

Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed: BSNP Segera Serahkan Draft Standar PAUD dan PJJ ke Kemendikbud

Updates - INDONESIASATU.CO.ID

Sep 18, 2020 - 14:09



Ketua BSNP, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed

JAKARTA – Setelah melalui uji publik dan menerima masukan dari para pemangku kepentingan, saat ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah menyelesaikan beberapa draft Permendikbud, yaitu Draft Permendikbud

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ([PAUD](#)), dan Draft Permendikbud tentang Standar [Pendidikan](#) Jarak Jauh (PJJ).

Ketua BSNP, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, menyampaikan, pendidikan berkualitas bisa terjadi bila Negara mempersiapkan proses pendidikan yang baik bagi setiap warga negaranya, mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini secara holistic dan integratif.

“Pengelolaan dan penyelenggaraan [pendidikan](#) anak usia dini menjadi sangat sentral agar anak-anak Indonesia mengalami proses tumbuh kembang dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya,” kata Mu'ti dalam acara konferensi pers secara daring di Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Oleh karena itu, lanjut Mu'ti, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, BSNP telah mengembangkan Standar Nasional [Pendidikan](#) untuk Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). “Kedua draft Permendikbud ini, akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tuturnya.

Disebutkan, Draft Permendikbud tentang [Pendidikan](#) Anak Usia Dini diusulkan untuk merevisi Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional [Pendidikan](#) Anak Usia Dini, karena hasil pemantauan BSNP tentang standar [PAUD](#) tersebut menunjukkan bahwa beberapa hal pengaturan dalam standar perlu diperbaharui.

Hal yang baru dalam draf ini meliputi: 1) Definisi pengelompokan anak usia dini yang berimplikasi pada pengaturan dan penguatan tanggungjawab keluarga pada pendidikan anak. 2) Lebih mengedepankan kesejahteraan peserta didik (wellbeing), termasuk mencegah tindakan diskriminatif, perundungan (bullying) dan pelecehan seksual. 3) Eksplisit mengamanatkan peranan orang tua dalam [pendidikan](#) anak.

4) Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) disusun secara lebih fleksibel berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. 5) Standar Isi mengamanatkan [Kurikulum PAUD](#) dikembangkan tidak dalam bentuk Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar. 6) Mengakomodasi kemerdekaan anak untuk bermain dalam proses belajar untuk mendapatkan pengalaman.

“Selama ini, belum ada Standar [Pendidikan](#) Jarak Jauh. Oleh karena itu, penyusunan draf [PJJ](#) melengkapi dan menyempurnakan [Permendikbud](#) sebelumnya agar layanan [pendidikan](#) jarak jauh semakin membuka akses, bukan hanya akses [pendidikan](#) bagi mereka yang memiliki kendala dan tidak dapat dilayani melalui sistem [pendidikan](#) reguler, melainkan juga sebagai antisipasi dan pilihan [pendidikan](#) di masa depan,” kata Mu'ti.

Mu'ti juga menjelaskan, Draft Permendikbud tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan usulan untuk perubahan Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan [Pendidikan](#) Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Istilah pembelajaran jarak jauh yang digunakan selama pandemi Covid-19 hanya merupakan bagian dari penyelenggaraan PJJ. Draft [Permendikbud](#) tentang PJJ

didesain untuk membangun sebuah sistem [pendidikan](#) yang menyeluruh untuk mengantisipasi kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi.

Di samping itu, draft ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian dan kualitas [pembelajaran](#) jarak jauh di masa kini dan masa depan, dan bukan hanya menjawab persoalan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19. “Draft [Permendikbud](#) PJJ dapat menjadi alternatif di luar modalitas [pendidikan](#) regular,” imbuhnya.

Hal yang baru dalam draft [Permendikbud](#) PJJ ini meliputi: 1) Adanya jaminan penyelenggaraan PJJ yang lebih berkualitas. 2) Sistem manajemen pembelajaran yang memenuhi standar penjaminan mutu [pendidikan](#). 3) Ditetapkannya persyaratan utama bagi satuan [pendidikan](#) yang akan menyelenggarakan PJJ. 4) Adanya komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi PJJ. 5) Sistem penilaian PJJ terintegrasi dalam sistem manajemen [pembelajaran](#) yang melibatkan peranan orang tua.

“Saat ini, BSNP juga sedang menyelesaikan revisi Standar Nasional [Pendidikan](#) dan mengembangkan panduan pembelajaran bagi [guru](#) berupa dokumen yang disebut dengan Fokus [Pembelajaran](#),” ungkapnya. (***)